

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur



Nanda Aprilia^{1,*}, Susi Susanti², Wawan Setiawan³

^{1, 2, 3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

* Corresponding author email: nandaaprilia4@gmail.com

ABSTRACT

Kemiskinan pedesaan masih menjadi permasalahan struktural yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan di pedesaan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pemerintah daerah, serta literatur relevan. Variabel yang dianalisis meliputi tingkat pendidikan, kesempatan kerja, struktur mata pencaharian, akses infrastruktur, dan tingkat pendapatan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan lapangan kerja non-pertanian, ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, serta minimnya akses terhadap infrastruktur dasar menjadi faktor dominan yang memperparah kemiskinan pedesaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan pedesaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2026-01-07

Revised 2026-02-23

Accepted 2026-02-28

Published 2026-03-13

Keywords

Kemiskinan,
Pedesaan,
Pendidikan,
Kesempatan Kerja,
Infrastruktur

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Di negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan publik. Kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak (Todaro & Smith, 2020). Wilayah pedesaan di Indonesia umumnya memiliki karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian tradisional menyebabkan masyarakat pedesaan rentan terhadap berbagai risiko, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan teknologi produksi. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan rumah tangga pedesaan cenderung rendah dan tidak stabil, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan (Ellis, 2000).

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang belum sepenuhnya teratasi. Keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya akses terhadap pasar dan permodalan menjadi faktor utama yang memperparah kondisi kemiskinan di pedesaan (BPS, 2023).

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebagian besar wilayahnya berupa pedesaan dengan mata pencaharian utama penduduk di sektor pertanian. Meskipun sektor ini berperan penting dalam menopang perekonomian daerah, produktivitas pertanian di Lombok Timur masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi, rendahnya kualitas pendidikan petani, serta kurang

optimalnya sistem irigasi dan infrastruktur pendukung lainnya (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2024).

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan menjadi salah satu faktor struktural penyebab kemiskinan. Pendidikan yang rendah membatasi kemampuan individu untuk meningkatkan keterampilan, mengakses informasi, serta memperoleh pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih baik. Becker (1993) menegaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi modal manusia yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu, sehingga berperan besar dalam pengurangan kemiskinan. Selain pendidikan, keterbatasan kesempatan kerja non-pertanian di pedesaan juga menjadi penyebab utama kemiskinan. Minimnya sektor industri dan jasa di wilayah pedesaan menyebabkan sebagian besar tenaga kerja bergantung pada sektor pertanian subsisten. Kondisi ini mempersempit peluang diversifikasi pendapatan rumah tangga dan meningkatkan risiko kemiskinan ketika sektor pertanian mengalami guncangan (Kuncoro, 2018).

Infrastruktur ekonomi dan sosial juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, irigasi, listrik, dan akses pasar dapat meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya distribusi, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang tidak memadai akan menghambat mobilitas barang dan tenaga kerja, sehingga memperkuat lingkaran kemiskinan di pedesaan (World Bank, 2022).

Kemiskinan di pedesaan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan sistemik. Faktor-faktor seperti kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya berpihak pada pedesaan, ketimpangan penguasaan lahan, serta keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal turut memperkuat kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, analisis kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan (Suryahadi et al., 2012).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pedesaan menjadi sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami faktor dominan penyebab kemiskinan, pemerintah daerah dapat merancang program intervensi yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat struktur ekonomi pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di pedesaan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025. Fokus penelitian diarahkan pada peran pendidikan, kesempatan kerja, struktur mata pencaharian, dan akses infrastruktur dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan pedesaan secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kemiskinan Pedesaan

Kemiskinan pedesaan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang ditandai oleh ketidakmampuan individu atau rumah tangga di wilayah pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak. Kebutuhan dasar tersebut mencakup kebutuhan makanan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Di wilayah pedesaan, kemiskinan sering kali bersifat kronis karena keterbatasan sumber daya, akses ekonomi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tersedia (Todaro & Smith, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini mengukur kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-makanan yang diperlukan untuk hidup layak. Standar kebutuhan minimum makanan ditentukan berdasarkan kecukupan kalori, sedangkan kebutuhan non-makanan meliputi perumahan, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2023). Kemiskinan pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kemiskinan perkotaan. Masyarakat pedesaan umumnya bergantung pada sektor pertanian dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang tidak

menentu. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan publik dan pasar menyebabkan masyarakat pedesaan memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya dibandingkan masyarakat perkotaan (Kuncoro, 2018).

Aspek sosial dan budaya juga turut mempengaruhi kemiskinan pedesaan. Struktur sosial yang masih tradisional, rendahnya mobilitas sosial, serta pola pikir yang cenderung menerima kondisi ekonomi apa adanya dapat memperkuat kemiskinan yang bersifat turun-temurun. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks (Chambers, 2006).

Selain itu, kemiskinan pedesaan sering kali bersifat multidimensional. Tidak hanya rendahnya pendapatan, masyarakat pedesaan juga menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pengukuran kemiskinan semata-mata berdasarkan pendapatan sering kali tidak mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat pedesaan secara utuh (World Bank, 2022).

Dengan demikian, konsep kemiskinan pedesaan harus dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan struktural. Pemahaman yang tepat mengenai konsep kemiskinan pedesaan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong mobilitas sosial. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan. Oleh karena itu, pendidikan sering dipandang sebagai instrumen utama dalam upaya pengurangan kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

Becker (1993) dalam teori modal manusia menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kemampuan produktif individu. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih luas, tingkat upah yang lebih tinggi, serta risiko kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah.

Di wilayah pedesaan, akses terhadap pendidikan formal masih relatif terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, jarak sekolah yang jauh, serta kondisi ekonomi keluarga yang lemah sering kali menyebabkan anak-anak di pedesaan tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan antar generasi (Suryahadi et al., 2012).

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan juga berdampak pada rendahnya adopsi teknologi dan inovasi dalam kegiatan ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Petani dengan tingkat pendidikan rendah cenderung menggunakan metode produksi tradisional yang kurang efisien, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperoleh tetap rendah (World Bank, 2022). Selain itu, pendidikan yang rendah membatasi kemampuan masyarakat pedesaan untuk mengakses informasi, lembaga keuangan, dan peluang usaha baru. Keterbatasan ini menyebabkan masyarakat sulit melakukan diversifikasi sumber pendapatan, sehingga ketergantungan pada satu sektor ekonomi semakin tinggi dan meningkatkan risiko kemiskinan (Kuncoro, 2018).

Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan merupakan strategi penting dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja pedesaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan yang bersifat struktural.

Kesempatan Kerja dan Struktur Mata Pencaharian

Kesempatan kerja merupakan faktor penting yang menentukan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di wilayah pedesaan, struktur mata pencaharian umumnya didominasi oleh sektor pertanian dengan karakteristik subsisten dan produktivitas rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat pedesaan memiliki pendapatan yang rendah dan tidak stabil (Ellis, 2000).

Terbatasnya kesempatan kerja non-pertanian di pedesaan mempersempit pilihan mata pencaharian masyarakat. Minimnya sektor industri dan jasa menyebabkan tenaga kerja pedesaan sulit beralih ke pekerjaan yang lebih produktif dan berpenghasilan lebih tinggi. Akibatnya, ketergantungan pada sektor pertanian menjadi sangat tinggi dan meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan (Kuncoro, 2018). Sektor pertanian subsisten sangat rentan terhadap berbagai risiko, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan fluktuasi harga komoditas. Ketika terjadi gagal panen atau penurunan harga hasil pertanian, pendapatan petani menurun secara signifikan dan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan rumah tangga pedesaan (Ellis, 2000).

Diversifikasi mata pencaharian merupakan salah satu strategi penting untuk mengurangi risiko kemiskinan di pedesaan. Dengan adanya kesempatan kerja di sektor non-pertanian, rumah tangga pedesaan dapat memperoleh sumber pendapatan tambahan yang lebih stabil. Namun, keterbatasan keterampilan dan modal sering menjadi hambatan utama dalam diversifikasi ekonomi pedesaan (World Bank, 2022). Selain itu, kualitas kesempatan kerja di pedesaan juga menjadi perhatian penting. Banyak pekerjaan yang tersedia bersifat informal dengan tingkat upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Kondisi ini menyebabkan meskipun masyarakat memiliki pekerjaan, mereka tetap berada dalam kategori miskin atau rentan miskin (Suryahadi et al., 2012).

Oleh karena itu, pengembangan kesempatan kerja produktif di pedesaan melalui penguatan sektor non-pertanian, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi langkah strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan secara berkelanjutan.

Infrastruktur dan Akses Ekonomi

Infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, irigasi, listrik, dan akses telekomunikasi, dapat membuka keterisolasian wilayah pedesaan dan meningkatkan konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi (Kuncoro, 2018). Keterbatasan infrastruktur di pedesaan menyebabkan tingginya biaya transaksi dan distribusi hasil produksi. Kondisi jalan yang buruk, misalnya, menyulitkan petani dalam mengangkut hasil pertanian ke pasar sehingga harga jual menjadi lebih rendah. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan (World Bank, 2022).

Infrastruktur irigasi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem irigasi yang tidak memadai menyebabkan petani sangat bergantung pada curah hujan, sehingga risiko gagal panen menjadi lebih tinggi. Rendahnya produktivitas pertanian akibat keterbatasan irigasi memperkuat kondisi kemiskinan di pedesaan (Todaro & Smith, 2020). Selain infrastruktur fisik, akses terhadap infrastruktur ekonomi seperti pasar dan lembaga keuangan juga sangat penting. Keterbatasan akses terhadap pasar menyebabkan petani memiliki posisi tawar yang lemah, sementara keterbatasan akses terhadap kredit menghambat pengembangan usaha produktif di pedesaan (Kuncoro, 2018).

Pembangunan infrastruktur juga memiliki efek multiplier terhadap perekonomian pedesaan. Infrastruktur yang baik dapat mendorong masuknya investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan secara jangka panjang (World Bank, 2022). Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang merata dan berkelanjutan menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan akses ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan, termasuk di Kabupaten Lombok Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di pedesaan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai hubungan antarvariabel berdasarkan data numerik yang terukur. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan pedesaan, sementara

analisis digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya (Sugiyono, 2019).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang relevan. Data yang digunakan mencakup tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, struktur mata pencaharian, tingkat pengangguran, dan ketersediaan infrastruktur pedesaan pada periode 2023-2025. Penggunaan data sekunder dinilai relevan karena data tersebut telah melalui proses pengumpulan dan verifikasi secara sistematis oleh lembaga berwenang (BPS, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menghimpun dan mengkaji laporan statistik, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kemiskinan pedesaan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif statistik untuk melihat pola dan kecenderungan setiap variabel, serta analisis komparatif untuk membandingkan kondisi antarwilayah pedesaan di Kabupaten Lombok Timur. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik kemiskinan pedesaan (Nazir, 2014).

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, data yang digunakan berasal dari sumber resmi dan terpercaya, serta dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari beberapa publikasi. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada kerangka teori kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan implikasi kebijakan yang relevan bagi upaya pengentasan kemiskinan pedesaan secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025 masih tergolong tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dipengaruhi oleh faktor struktural dan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan data BPS yang menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan cenderung lebih persisten akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif dan layanan publik (BPS, 2024). Faktor pendidikan terbukti memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kemiskinan pedesaan. Mayoritas penduduk miskin di pedesaan Lombok Timur memiliki tingkat pendidikan maksimal sekolah dasar. Rendahnya pendidikan menyebabkan keterbatasan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Temuan ini mendukung teori modal manusia yang menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kemiskinan (Becker, 1993).

Rendahnya tingkat pendidikan juga berdampak pada terbatasnya peluang masyarakat pedesaan untuk mengakses pekerjaan formal. Sebagian besar tenaga kerja hanya mampu bekerja di sektor informal dengan tingkat upah yang rendah dan tanpa jaminan sosial. Kondisi ini menyebabkan meskipun masyarakat memiliki pekerjaan, pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak (Suryahadi et al., 2012). Dari sisi struktur mata pencaharian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan di Kabupaten Lombok Timur. Namun, sektor ini didominasi oleh pertanian subsisten dengan produktivitas rendah. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian menyebabkan pendapatan rumah tangga sangat rentan terhadap faktor eksternal seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga hasil pertanian (Ellis, 2000).

Terbatasnya kesempatan kerja non-pertanian menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat kemiskinan pedesaan. Minimnya industri pengolahan dan sektor jasa di wilayah pedesaan menyebabkan rendahnya diversifikasi sumber pendapatan. Kondisi ini menghambat kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko kemiskinan secara berkelanjutan (Kuncoro, 2018).

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terselubung di sektor pertanian relatif tinggi. Banyak anggota rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan pertanian namun kontribusi produktivitasnya rendah. Fenomena ini menyebabkan rendahnya efisiensi

tenaga kerja dan berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita rumah tangga pedesaan (Todaro & Smith, 2020).

Faktor infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi kemiskinan di pedesaan Lombok Timur. Keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi menyebabkan tingginya biaya distribusi hasil pertanian ke pasar. Akibatnya, harga jual produk pertanian menjadi rendah dan pendapatan petani menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian World Bank (2022) yang menekankan pentingnya infrastruktur dalam meningkatkan akses ekonomi masyarakat pedesaan. Selain infrastruktur jalan, keterbatasan infrastruktur irigasi juga berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian. Ketergantungan pada curah hujan menyebabkan risiko gagal panen meningkat, terutama pada musim kemarau. Rendahnya hasil panen secara langsung mempengaruhi pendapatan rumah tangga dan memperparah kondisi kemiskinan (Kuncoro, 2018).

Akses terhadap pasar dan lembaga keuangan juga masih terbatas di sebagian wilayah pedesaan Lombok Timur. Petani dan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan formal. Keterbatasan modal ini menghambat pengembangan usaha produktif dan mempersempit peluang peningkatan pendapatan (World Bank, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan di pedesaan Lombok Timur saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Rendahnya pendidikan membatasi akses pekerjaan, keterbatasan pekerjaan memperkuat ketergantungan pada pertanian subsisten, sementara keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi memperlemah produktivitas dan pendapatan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan pedesaan di Kabupaten Lombok Timur bersifat struktural dan tidak dapat diatasi melalui pendekatan parsial. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kebijakan terpadu yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja non-pertanian, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan (Suryahadi et al., 2012).

Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan pedesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan investasi pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal agar kemiskinan pedesaan di Kabupaten Lombok Timur dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025 masih merupakan permasalahan struktural yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan meliputi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terbatasnya kesempatan kerja non-pertanian, ketergantungan tinggi pada sektor pertanian subsisten, serta keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan rumah tangga pedesaan sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang memperkuat kemiskinan pedesaan. Pendidikan yang rendah membatasi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, mengakses pekerjaan yang lebih produktif, dan mengadopsi teknologi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap pasar serta lembaga keuangan memperlemah daya saing ekonomi pedesaan dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, pengentasan kemiskinan di pedesaan Kabupaten Lombok Timur memerlukan kebijakan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan lapangan kerja produktif di sektor non-pertanian, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan akses ekonomi. Pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan pedesaan secara signifikan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. (2024). Kabupaten Lombok Timur dalam Angka. Selong: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Konsep dan Metodologi Pengukuran Kemiskinan. Jakarta: BPS.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bunga, E. N., & Haryanto, T. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 3016-3031.
- Bunga, E. N., & Haryanto, T. (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015-2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 3016-3031.
- Chambers, R. (2006). *Poverty Unperceived: Traps, Biases and Agenda*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Gibson, J., & Rozelle, S. (2003). Poverty and access to roads in Papua New Guinea. *Economic development and cultural change*, 52(1), 159-185.
- Heriska, R., Agustian, E., & Mutaqin, Z. (2023). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 504-516.
- Hidayanti, A. A., & Mandalika, E. N. D. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Buruh Tani Perempuan Pada Usahatani Cabai Rawit Di Kawasan Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek*, 5(2), 141-148.
- Hidayani, F., Novita, Y., & Hurriati, L. (2024). ANALISIS FAKTOR PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI DAERAH NUSA TENGGARA BARAT. *JOURNAL OF ECONOMIC, BUSINESS AND TOURISM*, 1(2), 30-40.
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(3).
- Kuncoro, M. (2018). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Lipton, M. (1977). *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development*. London: Temple Smith.
- Manoppo, J. J., Engka, D. S., & Tumangkeng, S. Y. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2).
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016-2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 953-960.
- Nalle, F. W. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 35-45.
- Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., & Petesch, P. (2000). *Voices of the Poor: Crying Out for Change*. Washington, DC: World Bank.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oki, K. K., Akoit, M. Y., & Bubu, H. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Desa Takarai Kabupaten Malaka. *EKOPEM: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(3), 46-54.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2).
- Purwadinata, S. (2024). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kabupaten Lombok Timur. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1619-1627.
- Rahmatullah, J. F., Iriani, R., & Wijaya, R. S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Desa Sumberbrantas. *Jambura Economic Education Journal*, 4(2), 106-117.
-

- Ravallion, M. (2016). *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford: Oxford University Press.
- Rosyadi, I. (2017). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Perspektif Struktural. *URECOL*, 499-512.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Silooy, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Jurnal Cita Ekonomika*, 11(1), 79-84.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2003). Poverty and vulnerability in Indonesia before and after the economic crisis. *Asian Economic Journal*, 17(1), 45-64.
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2012). Economic growth and poverty reduction in Indonesia before and after the Asian financial crisis. *Bulletin of Indonesian economic studies*, 48(2), 209-227.
- Tisniwati, B. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 33-46.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. New York: Pearson Education.
- Tripena, A., Lianawati, Y., & Setyawan, A. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Desa Kotayasa melalui Pendekatan Regresi Logistik Biner. *Electro Luceat*, 9(2), 43-58.
- UNDP. (2022). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.
- Wangsa, L. R. S., & Suropto, S. (2025). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (STUDI KASUS PROGRAM DEKAPAN PKK CANTING SRIKANDI) (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects*. Washington, DC: World Bank.
- Yowa, M. K., Hudang, A. K., & Renggo, Y. R. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Desa Kondamara Kecamatan Lewa. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1065-1077.